



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	24 (Dua Puluh Empat)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Februari 2023
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022.
Hadir	:	1. 48 Orang dari 57 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Bapak Erick Thohir; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada pukul 10.36 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 13 Februari 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian penyerapan anggaran Kementerian BUMN Tahun 2022 yang mencapai 99,06% dari pagu anggaran tahun 2022.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian BUMN RI yang telah melaksanakan transformasi BUMN sehingga menghasilkan peningkatan kinerja korporasi dan keuangan BUMN pada tahun 2022 dan kontribusi BUMN kepada negara.
3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk terus melakukan transformasi BUMN secara berkelanjutan sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang lebih baik pada periode-periode selanjutnya termasuk mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam rangka menciptakan pengelolaan BUMN yang transparan, profesional, efektif dan efisien.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan laporan kinerja BUMN Tahun 2022 terkonsolidasi dan laporan kinerja masing-masing BUMN kepada Komisi VI DPR RI untuk mengetahui BUMN yang berkinerja baik dan BUMN yang berkinerja buruk termasuk penjelasan penyebab kerugian BUMN yang selanjutnya dapat disusun strategi perbaikan dan pengembangan BUMN.
5. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan dana pensiun BUMN untuk mencegah hilangnya hak-hak pekerja BUMN.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk melakukan valuasi dan strategi yang tepat kepada BUMN yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO).
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.08 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-189**